p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Inovasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Untuk Mengurangi Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Innovation in Tourism Development Policy to Reduce Poverty in Coastal Areas

***Rukin**

Universitas Modern Al Rifa`ie Indonesia
Jl. Raya Ketawang, Krajan, Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 7 Desember 2025
Perbaikan naskah: 17 Maret 2026
Disetujui terbit : 19 April 2026

*Korespodensi penulis:
Email: rukinspdmsi1975@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v16i1.16550

ABSTRAK

Wilayah pesisir Kabupaten Malang memiliki potensi wisata strategis yang dapat diolah sebagai instrumen kebijakan untuk menggerakkan ekonomi desa dan menekan kemiskinan struktural. Destinasi seperti Balekambang, Sendang Biru, dan Tiga Warna menawarkan keunggulan ekologis dan kultural yang membuka ruang diversifikasi ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada perikanan tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, tantangan, dan peluang pengembangan pariwisata pesisir Kabupaten Malang sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan pembangunan pariwisata pesisir serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir ditopang oleh kelembagaan lokal yang kuat, sumber daya manusia yang terlatih, dan keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan wisata. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pembangunan pesisir berbasis kearifan lokal dengan model partisipatif seperti *Community-Based Ecotourism (CBET)* dan *Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM)* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Kombinasi kebijakan adaptif dan partisipasi komunitas terbukti menciptakan sinergi yang mendorong keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kemiskinan struktural di wilayah pesisir.

Kata Kunci: pariwisata pesisir; pembangunan desa; kebijakan inovatif; pengentasan kemiskinan; partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The coastal areas of Malang Regency possess strategic tourism potential that can be developed as a policy instrument to stimulate the village economy and alleviate structural poverty. Destinations such as Balekambang, Sendang Biru, and Tiga Warna offer ecological and cultural advantages that provide economic diversification for residents who have traditionally relied on traditional fishing. This study aims to analyze the potential, challenges, and opportunities for coastal tourism development in Malang Regency as a local-based poverty alleviation strategy. The study employed a descriptive qualitative approach, employing library research and policy analysis. This approach was used to examine coastal tourism development policies and assess their suitability to community needs and the principles of sustainable development. The findings indicate that successful coastal tourism development is supported by strong local institutions, trained human resources, and active community involvement in tourism management. The study's key findings demonstrate that integrating local wisdom-based coastal development policies with participatory models such as Community-Based Ecotourism (CBET) and Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM) can increase the effectiveness of tourism management while strengthening the economies of coastal communities. The combination of adaptive policies and community participation has been proven to create synergies that promote environmental sustainability, improve welfare, and reduce structural poverty in coastal areas.

Keywords: coastal tourism; village development; innovative policy; poverty alleviation; community participation

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang bagian selatan menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata pesisir. Garis pantai yang luas dan keindahan alam yang memesona, seperti Pantai Balekambang, Sendang Biru, dan Tiga Warna, menjadikan kawasan ini layak dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Selain panorama laut dan pasir putih, kawasan ini juga kaya akan tradisi lokal dan praktik budaya masyarakat nelayan yang dapat diangkat menjadi daya tarik wisata. Potensi pariwisata tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Minimnya pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, menyebabkan pengelolaan kawasan wisata masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat lokal sebagai pelaku utama di wilayah pesisir (Handartoputra *et al*., 2015).

Di balik pesona alam yang ditawarkan, wilayah pesisir Kabupaten Malang juga menghadapi

tantangan serius dalam hal kemiskinan struktural. Sebagian besar masyarakat pesisir masih menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap yang rentan terhadap cuaca ekstrem, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan laut. Kondisi ini memperparah kerentanan ekonomi nelayan karena tidak adanya jaminan pendapatan yang stabil (Ariyanti, 2015). Faktor lain yang memperkuat kemiskinan di kawasan ini adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Desa-desa pesisir kerap tertinggal dalam pembangunan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan dan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan berbasis potensi lokal. Akibatnya, masyarakat tidak mampu bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Malang bersifat multidimensional. Selain karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, keterbatasan akses terhadap informasi, dan ketergantungan pada satu sektor pekerjaan mempersempit peluang warga pesisir untuk keluar dari kemiskinan. Ketimpangan sosial antara kawasan pesisir dan perkotaan juga makin melebar karena distribusi sumber daya pembangunan yang tidak merata. Sementara itu, pariwisata pesisir, bila dikelola secara adil dan berkelanjutan, memiliki potensi besar sebagai strategi pembangunan alternatif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Pengembangan sektor ini dapat mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dan budaya pesisir sehingga memberikan nilai tambah ekonomi secara merata. Pendekatan pariwisata yang inklusif memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada investor besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga lokal. Dengan demikian, pariwisata pesisir dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan pesisir dan perkotaan, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui keunikan potensi lokal (Insani *et al*., 2015).

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata pesisir juga mampu memperkuat modal sosial dan memperluas peluang kerja melalui berbagai aktivitas ekonomi turunan. Kegiatan seperti pengelolaan homestay, penyediaan transportasi lokal, kuliner khas, hingga kerajinan berbasis budaya pesisir menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Pengelolaan berbasis keberlanjutan menekankan pelestarian ekosistem sekaligus pemberdayaan komunitas, sehingga kesejahteraan ekonomi berjalan beriringan dengan konservasi lingkungan. Strategi ini tidak hanya memberi dampak jangka pendek pada peningkatan pendapatan, tetapi juga membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Insani *et al*., 2015).

Keberhasilan pengembangan wisata pesisir sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal. Model *community-based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan aktor utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari kegiatan wisata. Di Pantai Ungapan, misalnya, pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan ekowisata terbukti mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap sumber daya lokal (Insani *et al*., 2015). Namun demikian, berbagai kendala masih membayangi pengembangan pariwisata pesisir. Minimnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan fasilitas sanitasi, serta kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi digital membuat pelaku wisata lokal kesulitan mempromosikan destinasi dan produk unggulannya secara lebih luas.

Dalam konteks kebijakan daerah, pariwisata pesisir perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan wilayah terpadu. Program pengembangan desa wisata dan pemberdayaan ekonomi lokal perlu disusun secara partisipatif, berbasis potensi, dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi dan sosial. Kebijakan yang hanya mengejar kunjungan wisatawan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan berdampak pada degradasi ekosistem dan konflik kepentingan antar pelaku. Pemerintah Kabupaten Malang telah mencanangkan sejumlah program untuk mendukung sektor pariwisata, seperti pengembangan kawasan Pantai Tiga Warna sebagai destinasi konservasi berbasis edukasi. Namun, keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, dan lemahnya sinergi antar instansi kerap menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan pesisir membutuhkan tata kelola yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting agar kebijakan tidak bersifat *top-down* dan terlepas dari kebutuhan riil di lapangan. Pelibatan komunitas lokal dalam forum musyawarah pembangunan desa, pelatihan ekowisata, dan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dapat menjadi cara untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal (Hermawati, 2015). Selain itu, integrasi antara sektor perikanan dan pariwisata perlu dipertimbangkan dalam skema pembangunan pesisir. Misalnya, pengembangan wisata edukasi berbasis perikanan tangkap, budidaya laut, atau kuliner hasil laut khas lokal dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan rantai ekonomi baru yang memperluas kesempatan kerja. Strategi ini dapat memutus ketergantungan masyarakat pada satu sektor dan meningkatkan resiliensi ekonomi terhadap perubahan iklim maupun fluktuasi pasar.

Masalah kemiskinan tidak bisa diatasi dengan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan sektoral dan terintegrasi diperlukan untuk menciptakan transformasi sosial di wilayah pesisir. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan komunitas lokal menjadi penting dalam menyusun model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial. Studi oleh Handartoputra *et al*. (2015) menunjukkan bahwa penerapan indeks kerentanan pesisir seperti Coastal Vulnerability Index (CVI) dapat menjadi alat bantu dalam merancang kebijakan tata ruang pesisir yang adaptif terhadap risiko lingkungan. Pengembangan pariwisata tidak boleh mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, terutama di kawasan yang rentan terhadap abrasi dan kenaikan muka air laut.

Sebagai salah satu wilayah pesisir strategis di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai motor pengentasan kemiskinan. Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif. Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal akan menjadi kunci dalam menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berkeadilan. Transformasi tersebut menuntut pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi berbasis komunitas. Pemerintah perlu mendorong munculnya inovasi lokal yang tumbuh dari bawah, serta mendukung dengan regulasi, pendanaan, dan pendampingan teknis. Dengan pendekatan ini, kawasan pesisir tidak lagi menjadi wilayah marjinal, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyejahterakan masyarakatnya.

Mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir membutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal dalam satu kerangka kebijakan afirmatif yang terukur. Sinergi ini harus memastikan distribusi manfaat pembangunan berjalan secara adil, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Perencanaan berbasis data, dukungan infrastruktur, akses permodalan, serta pelatihan kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen penting untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga harus sensitif terhadap konteks lokal agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat pesisir. Bila dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, pariwisata pesisir dapat menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang memampukan masyarakat pesisir untuk mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap masalah kemiskinan struktural dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi berbasis potensi lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global. Dengan mengintegrasikan konservasi lingkungan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata pesisir berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang resilien sekaligus memperkuat identitas budaya. Dalam jangka panjang, model pembangunan ini dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, tantangan, dan peluang pengembangan pariwisata pesisir Kabupaten Malang sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Selain itu, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menekankan prinsip partisipasi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan pembangunan pariwisata pesisir serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan pembangunan daerah, data statistik, artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kebijakan dilakukan untuk

mengkaji agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta menilai instrumen kebijakan yang digunakan. Selain itu, juga digunakan untuk mengidentifikasi tema, arah kebijakan, dan tingkat keselarasan antara kebijakan pariwisata pesisir dengan kebutuhan lokal. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan laporan resmi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

PARIWISATA PESISIR SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEMBANGUNAN

Pariwisata pesisir telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pembangunan wilayah. Di Indonesia, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2024 mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan, dengan sebagian besar destinasi berbasis sumber daya alam dan kawasan pesisir. Di berbagai daerah pesisir, perkembangan destinasi wisata juga mendorong pertumbuhan desa wisata yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pariwisata pesisir tidak hanya berfungsi sebagai sektor jasa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang mampu menggerakkan berbagai aktivitas produktif masyarakat.

Secara teoritis, kontribusi pariwisata pesisir terhadap pembangunan dapat dijelaskan melalui konsep *multiplier effect*, yaitu kemampuan sektor pariwisata dalam menciptakan dampak ekonomi berantai pada berbagai sektor lainnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan mendorong permintaan terhadap jasa transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan lokal, hingga produk ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Di sejumlah kawasan pesisir Indonesia, perkembangan wisata bahari terbukti meningkatkan peluang kerja bagi nelayan, pelaku UMKM, pemandu wisata, pengelola homestay, dan kelompok usaha berbasis komunitas. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, pendekatan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) menjadi strategi yang semakin relevan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi pariwisata. Pendekatan tersebut penting karena sebagian besar masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti keterbatasan akses ekonomi, rendahnya diversifikasi mata pencaharian, dan ketergantungan yang tinggi terhadap eksploitasi sumber daya alam. Melalui ekowisata berbasis masyarakat, potensi ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, pantai, dan budaya lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi fungsi ekologisnya.

Data empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata pesisir berbasis masyarakat mampu meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas ekonomi lokal sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat. Keterlibatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi desa, kelompok nelayan, dan organisasi masyarakat lokal telah menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pengembangan ekowisata juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan pesisir sebagai aset utama pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi lingkungan dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata pesisir sebagai motor penggerak pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kebijakan yang diterapkan. Pengembangan yang hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan pariwisata pesisir tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem pesisir, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, pariwisata pesisir dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Namun, untuk mewujudkan fungsi tersebut diperlukan model pengembangan yang berbasis pada prinsip ekowisata dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan analisis pada bagaimana pariwisata pesisir dapat dikembangkan melalui pendekatan ekowisata berbasis masyarakat sebagai strategi pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dalam jangka panjang. Dengan demikian, hubungan antara pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah pesisir menjadi lebih jelas dan terukur sebagai dasar perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Ekowisata Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir

Ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi kegiatan wisata. Konsep ini dikembangkan sebagai respons terhadap model pariwisata konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ekowisata berbasis masyarakat bertujuan menciptakan keseimbangan antara konservasi sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu destinasi tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga darisejauh mana manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.

Pendekatan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Malang memiliki relevansi yang tinggi mengingat wilayah ini memiliki garis pantai selatan yang panjang dengan beragam potensi wisata pesisir, seperti Pantai Balekambang, Sendang Biru, Goa Cina, Tiga Warna, Clungup, Ungapan, Ngliyep, dan beberapa destinasi pesisir lainnya. Keberadaan ekosistem mangrove, terumbu karang, kawasan konservasi, serta kekayaan budaya masyarakat pesisir menjadi modal penting bagi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi peran masyarakat dalam tata kelola pariwisata. Di beberapa kawasan, masyarakat masih berperan sebagai penerima manfaat pasif, sementara pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi wisata cenderung didominasi oleh pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pengembangan yang lebih partisipatif agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari aktivitas pariwisata.

Penerapan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Malang dapat dilakukan melalui penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), serta berbagai organisasi lokal yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan homestay, jasa pemandu wisata, usaha kuliner, penyediaan transportasi lokal, hingga kegiatan konservasi lingkungan dapat memperluas peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya wisata secara mandiri. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan akses pembangunan.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis strategi pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan melalui pendekatan ekowisata berbasis masyarakat, konsep tersebut menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat lokal. Analisis tidak hanya difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kemampuan kebijakan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dengan pendekatan ini, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir sebagai aset pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Kemiskinan di Wilayah Pesisir dan Strategi Pengurangannya melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat

Kemiskinan di wilayah pesisir merupakan persoalan pembangunan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal usaha, infrastruktur, teknologi, dan kesempatan kerja. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kemiskinan pesisir dipandang sebagai kondisi kerentanan yang muncul akibat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang sifatnya fluktuatif serta terbatasnya diversifikasi sumber penghidupan. Masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan tangkap sering menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat perubahan musim, kondisi cuaca, dan dinamika pasar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat pesisir sulit keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun berada di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Dalam konteks Kabupaten Malang, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan, termasuk pada kawasan pesisir selatan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan, pertanian lahan marginal, dan pekerjaan informal lainnya. Potensi wisata pesisir yang berkembang di berbagai kawasan pantai sebenarnya membuka peluang untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Namun demikian, tanpa kebijakan yang mampu menghubungkan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat lokal, manfaat ekonomi yang dihasilkan berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mampu memastikan bahwa aktivitas pariwisata menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif.

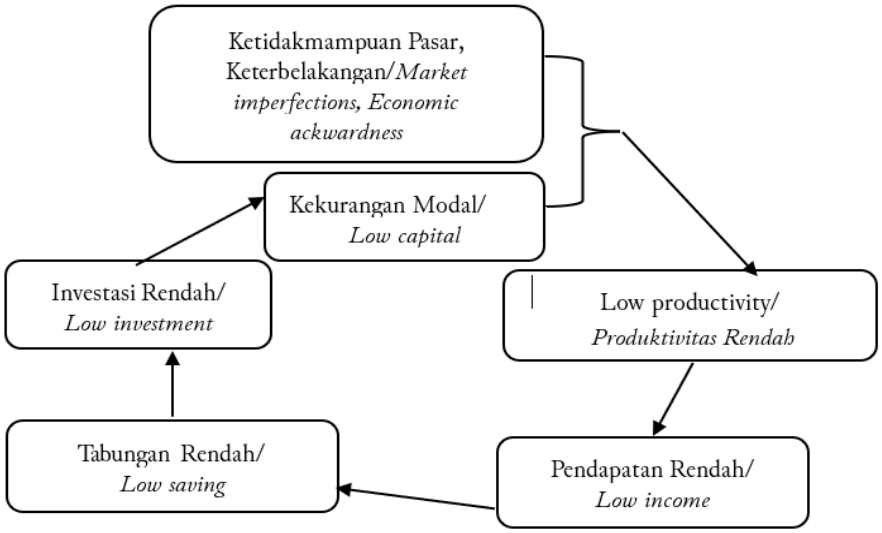
Dalam kerangka kebijakan pembangunan Kabupaten Malang, pendekatan ekowisata berbasis masyarakat menjadi relevan karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, sumber daya pesisir tidak semata-mata diposisikan sebagai objek wisata, melainkan sebagai aset pembangunan yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi, penguatan modal sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata pesisir perlu diukur berdasarkan kemampuannya dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga pesisir. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian ini, kajian mengenai kemiskinan wilayah pesisir diarahkan untuk menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata pesisir berbasis ekowisata masyarakat dapat menjadi instrumen kebijakan dalam mendukung pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malang. Analisis tersebut penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata telah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat tidak hanya dipandang sebagai strategi pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga sebagai pendekatan pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan di kawasan pesisir Kabupaten Malang. Rukin, (2020) kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: Kemiskinan (*proper*), Ketidakberdayaan (*powerless*), Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), Ketergantungan (*dependence*), dan Keterasingan *(isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hal itu digambarkan dalam Lingkaran Setan Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.

Dimensi Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir

Dimensi lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata pesisir berkelanjutan. Secara konseptual, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kelestarian ekosistem yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, lingkungan dipandang sebagai modal dasar (*natural capital*) yang harus dikelola secara bijaksana agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pesisir harus memperhatikan daya dukung lingkungan, kapasitas ekosistem, serta risiko kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas wisata.

Dalam konteks Kabupaten Malang, kawasan pesisir selatan memiliki berbagai sumber daya ekologis yang menjadi penopang utama aktivitas

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280



Gambar 1. Lingkaran Setan Keminskinan.
(Sumber: Rukin, 2020)

pariwisata, seperti pantai, hutan mangrove, terumbu karang, kawasan konservasi, serta keanekaragaman hayati laut. Destinasi seperti Pantai Tiga Warna, Clungup Mangrove Conservation (CMC), Sendang Biru, dan beberapa kawasan pesisir lainnya menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki hubungan langsung dengan daya saing destinasi wisata. Keberadaan kawasan konservasi yang menerapkan pembatasan jumlah pengunjung, kegiatan rehabilitasi mangrove, serta edukasi lingkungan merupakan contoh implementasi prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan fungsi konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik tidak menjadi hambatan bagi pengembangan pariwisata, tetapi justru menjadi faktor pendukung keberlanjutan destinasi.

Secara normatif, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang perlu diarahkan pada prinsip ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari kegiatan wisata. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, pengawasan lingkungan, pengelolaan sampah, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan edukasi wisata menjadi mekanisme penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diperoleh dari pariwisata berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan penguatan kesadaran ekologis masyarakat. Sedangkan penguatan aset sosial dan alam melalui pariwisata dapat membuka jalan bagi diversifikasi sumber pendapatan dan pengurangan ketergantungan terhadap sektor perikanan (Firdaus & Witomo, 2015).

Berdasarkan perspektif tersebut, pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara kebijakan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola destinasi. Hubungan antara ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat dapat mendukung pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Malang. Dengan demikian, dimensi lingkungan tidak diposisikan sebagai aspek pendukung semata, melainkan sebagai elemen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata pesisir dalam jangka panjang.

Community-Based Ecotourism (CBET)

Penerapan *Community-Based Ecotourism* (CBET) di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC), Dusun Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan tujuan konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pengelolaan destinasi oleh kelompok masyarakat *Bhakti Alam Sendang Biru* telah mencerminkan prinsip dasar CBET, yaitu partisipasi masyarakat, konservasi sumber daya alam, pendidikan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Model ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata yang berkembang. Dalam konteks tujuan penelitian, praktik tersebut menunjukkan bahwa pariwisata pesisir dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dan pelestarian lingkungan pesisir.

Meskipun demikian, implementasi CBET di Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam aspek manajemen destinasi, pemasaran digital, pelayanan wisata, pengelolaan keuangan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar pariwisata. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata pesisir berasal dari latar belakang nelayan atau sektor informal sehingga belum seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola destinasi wisata secara profesional. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi pada sejumlah individu atau kelompok penggerak tertentu, sehingga keberlanjutan program sering kali menghadapi tantangan ketika kapasitas kelembagaan belum berkembang secara merata.

Selain persoalan SDM, pengembangan pariwisata pesisir juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir. Kawasan pesisir Kabupaten Malang tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, tetapi juga untuk aktivitas perikanan, konservasi, perdagangan, dan berbagai kepentingan ekonomi lainnya. Dalam situasi tertentu, perluasan aktivitas wisata dapat menimbulkan persaingan pemanfaatan ruang dengan kelompok nelayan tradisional atau masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir. Apabila tidak dikelola melalui mekanisme tata kelola yang inklusif dan partisipatif, konflik kepentingan tersebut dapat mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pengembangan wisata dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari perspektif keberlanjutan, implementasi CBET juga menghadapi berbagai **risiko sosial-ekologis**. Meningkatnya jumlah wisatawan tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menyebabkan penumpukan sampah, kerusakan vegetasi pesisir, gangguan terhadap habitat satwa, hingga penurunan kualitas lingkungan yang justru menjadi daya tarik utama destinasi. Risiko tersebut semakin besar apabila kapasitas pengelolaan lingkungan tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan aktivitas wisata. Oleh karena itu, keberhasilan CBET tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas CBET adalah kelembagaan lokal yang masih relatif lemah. Dalam beberapa kasus, koordinasi antara kelompok pengelola wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Keterbatasan regulasi operasional, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta belum meratanya distribusi manfaat ekonomi dapat menimbulkan persoalan keberlanjutan dalam jangka panjang. Padahal, dalam pendekatan CBET, kelembagaan lokal berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur partisipasi masyarakat, mengelola konflik kepentingan, memastikan transparansi pengelolaan, dan menjaga keberlanjutan program.

Dalam kerangka kebijakan daerah, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 telah menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi pesisir sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Namun demikian, hasil implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kapasitas aktor lokal dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program yang efektif. Oleh karena itu, penguatan SDM, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyelesaian konflik pemanfaatan ruang pesisir, serta penguatan mekanisme konservasi lingkungan menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam pengembangan CBET di Kabupaten Malang. Penelitian Handayani *et al*. (2023) di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pengelolaan objek wisata Sumber Songo dan situs peninggalan Kerajaan Jenggolo, masyarakat setempat terlibat aktif dalam konservasi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan analisis tersebut, CBET di Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk mendukung tujuan penelitian, yaitu menjadikan pariwisata pesisir sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

terhadap pengurangan kemiskinan masyarakat pesisir. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hambatan implementasi, memperkuat kelembagaan lokal, mengelola konflik kepentingan, serta meminimalkan risiko sosial-ekologis yang muncul dari perkembangan aktivitas pariwisata. Dengan demikian, keberhasilan CBET tidak hanya terletak pada peningkatan aktivitas wisata, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

Secara keseluruhan, berbagai studi dan kebijakan menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Malang yang berbasis kearifan lokal memerlukan pendekatan partisipatif, integratif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PESISIR DI KABUPATEN MALANG

Kabupaten Malang, dengan garis pantai sepanjang pesisir selatan, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata pesisir. Kawasan ini menawarkan keindahan alam yang beragam, mulai dari pantai berpasir putih hingga tebing-tebing karst yang menjulang. Potensi ini telah diakui dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016–2021, yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah. Salah satu kawasan yang menjadi fokus pengembangan adalah Pantai Modangan di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Pantai ini dikenal dengan panorama alamnya yang indah dan menjadi lokasi olahraga paralayang. Namun, sebagai kawasan wisata yang relatif baru, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pariwisata .

Kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang juga mencakup pengembangan desa wisata, seperti Desa Kucur di Kecamatan Dau. Desa ini memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal untuk menarik wisatawan, dengan mengembangkan objek wisata seperti Lembah Gunung Sari. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata menjadi kunci keberhasilan pengembangan desa wisata ini. Namun demikian, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan integrasi antar-sektor dan instansi yang terlibat dalam pengembangan kawasan pesisir. Kurangnya koordinasi dapat menghambat upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian. Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan dampak terhadap

Tabel 1. Hubungan Kebijakan, Partisipasi Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan.

Komponen	Fokus Analisis	Temuan Utama	Dampak terhadap Pengurangan Kemiskinan
Kebijakan Daerah	Penguatan sektor pariwisata dan perikanan berbasis potensi lokal	Arah kebijakan mendorong pengembangan destinasi pesisir yang berkelanjutan	Memperluas peluang ekonomi dan pemerataan manfaat
Community-Based Ecotourism (CBET)	Pengelolaan ekowisata CMC oleh masyarakat	Prinsip konservasi, partisipasi, edukasi, ekonomi, pariwisata berjalan efektif	Pendapatan meningkat dan resiliensi ekonomi bertambah
Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal	Keterlibatan masyarakat Desa Jenggolo dalam konservasi dan pemasaran	Identitas budaya dan tata kelola lokal menguat	Pendapatan rumah tangga bertambah
Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM)	Penguatan kapasitas dan kelembagaan pesisir	Pengelolaan sumber daya lebih efektif dan minim konflik	Ketahanan ekonomi meningkat
Kearifan Lokal	Integrasi nilai budaya dalam pengelolaan pesisir	Pengetahuan lokal menjadi dasar konservasi dan inovasi	Model pembangunan adaptif dan minim konflik
Partisipasi Masyarakat	Aktor utama perencanaan dan pengelolaan	Kepemilikan dan efektivitas program meningkat	Manfaat ekonomi lebih merata

ekosistem pesisir dan laut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan konservasi lingkungan dalam pengembangan pariwisata, seperti penerapan prinsip ekowisata dan pengelolaan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan community-based tourism (CBT) menjadi relevan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Studi di Pantai Ungapan menunjukkan bahwa pendekatan CBT dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial .

Untuk mendukung pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang memperkuat kelembagaan lokal dan sistem tata kelola yang berbasis komunitas. Hal ini mencakup pelatihan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemetaan potensi berbasis partisipatif. Selain itu, promosi pariwisata juga menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ini. Penggunaan media digital dan promosi berbasis komunitas dapat meningkatkan visibilitas destinasi wisata dan menarik lebih banyak wisatawan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sektor pariwisata. Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengembangan pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata pesisir harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko bencana, mengingat wilayah pesisir rentan terhadap bencana alam seperti abrasi dan tsunami. Oleh karena itu, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pariwisata menjadi hal yang penting. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, juga menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini dapat menciptakan sinergi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

Dalam hal ini, model hexa helix yang melibatkan enam unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan kesehatan dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam pengembangan pariwisata. Model ini telah diterapkan di Kabupaten Sumenep dan menunjukkan hasil yang positif dalam pengembangan sektor pariwisata .Penerapan model hexa helix di Kabupaten Malang dapat memperkuat kolaborasi antar-stakeholder dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata pesisir. Hal ini juga dapat mendorong inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi sektor pariwisata. Dalam jangka panjang, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya lokal.Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, sementara masyarakat dan sektor swasta perlu aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Malang telah mengidentifikasi wilayah pesisir sebagai salah satu kawasan strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Wilayah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya kelautan dan wisata bahari yang besar, namun juga menyimpan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembangunan, kemiskinan, dan kerentanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan konservasi. Salah satu strategi utama yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Malang adalah pengembangan desa wisata pesisir berbasis potensi lokal. Program ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Desa seperti Tambakrejo (Pantai Sendang Biru) dan Sitiarjo (Pantai Goa Cina dan Tiga Warna) telah dijadikan contoh penerapan pengelolaan wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Menurut studi Handayani *et al*. (2023), keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

kapasitas kelembagaan masyarakat dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah.

Kebijakan daerah juga memberi perhatian pada integrasi sektor perikanan dan pariwisata. Pemerintah mendukung pengembangan pelabuhan perikanan rakyat di Pantai Sendang Biru sebagai pusat aktivitas ekonomi pesisir yang melibatkan nelayan, pedagang ikan, serta pelaku industri pengolahan hasil laut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perikanan melakukan pembinaan terhadap koperasi nelayan dan kelompok pengolah hasil perikanan untuk memperkuat rantai nilai ekonomi lokal (Dinas Perikanan Malang, 2021). Upaya ini ditujukan agar masyarakat pesisir tidak hanya menjual hasil tangkapan mentah, tetapi juga mampu mengolah dan memasarkan produk bernilai tambah. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021–2026, sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata ditempatkan sebagai sektor unggulan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antar sektor, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju pantai, fasilitas air bersih, dan pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat pesisir. Program pelatihan tersebut mencakup pengelolaan homestay, kuliner laut, serta digitalisasi promosi wisata melalui platform media sosial.

Selain pendekatan ekonomi, kebijakan pemerintah juga menekankan dimensi konservasi dan mitigasi bencana. Pesisir selatan Kabupaten Malang dikenal sebagai wilayah yang rawan abrasi dan tsunami. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ekonomi pesisir dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan prinsip tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana. Program Clungup Mangrove Conservation (CMC) adalah salah satu contoh konkret upaya pelestarian lingkungan yang berbasis masyarakat dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun NGO lingkungan (Husamah, 2017). Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Malang memanfaatkan dana transfer pusat, Dana Desa, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor dalam membiayai program pembangunan ekonomi pesisir. Dukungan pendanaan ini digunakan untuk pembangunan sarana pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas pelatihan UMKM, serta promosi potensi wisata melalui festival dan pameran lokal. Kebijakan fiskal ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mendorong akselerasi ekonomi pesisir melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi lokal.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti minimnya koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), keterbatasan sumber daya manusia di desa, serta rendahnya literasi digital masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kelembagaan lintas sektor, monitoring dan evaluasi yang ketat, serta penyusunan indikator keberhasilan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur utama. Seperti dikemukakan oleh Tiyasmono *et al*. (2019), penguatan modal sosial dan pengembangan desa wisata harus diiringi dengan reformasi tata kelola agar kebijakan benar-benar berorientasi pada masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan perekonomian wilayah pesisir telah mengarah pada integrasi antara potensi alam, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Meski masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan, komitmen terhadap pengembangan kawasan pesisir sebagai basis ekonomi lokal yang berkelanjutan terus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekonomi pesisir yang tangguh, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN MALANG DALAM MENGURAI KEMISKINAN

Kabupaten Malang memiliki potensi wilayah pesisir yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi ini mencakup sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari. Namun, sebagian besar masyarakat pesisir masih berada dalam kategori rumah tangga miskin atau rentan miskin, ditandai dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, serta lapangan kerja formal. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir yang inklusif menjadi salah satu strategi utama Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengurai kemiskinan secara sistematis. Pemerintah daerah menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan memadukan prinsip-prinsip *people-centered development*, yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat. Hal ini terlihat dalam pengembangan desa wisata pesisir seperti di Tambakrejo dan Sendangbiru, yang tidak hanya mengandalkan keindahan pantai, tetapi juga mengintegrasikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal (Rahma & Primasworo, 2018). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru,

tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat lokal.

Implementasi Prinsip *Sustainable Development* dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Kabupaten Malang

Pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam penelitian ini, konsep *sustainable development* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pengembangan pariwisata pesisir mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Analisis ini penting karena tujuan penelitian tidak hanya mengidentifikasi potensi pariwisata pesisir, tetapi juga mengevaluasi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan kunjungan wisatawan, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya pesisir.

Dari dimensi lingkungan, program *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malang. Pengelolaan kawasan ini mengintegrasikan kegiatan konservasi mangrove, perlindungan ekosistem pesisir, edukasi lingkungan, dan aktivitas wisata berbasis konservasi. Model pengelolaan tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan sehingga sumber daya alam tetap terjaga sebagai modal pembangunan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahab *et al*. (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan ekowisata berbasis konservasi dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tujuan penelitian, praktik di CMC menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat.

Dari dimensi ekonomi, pemerintah Kabupaten Malang mengembangkan sektor pariwisata dan industri berbasis sumber daya pesisir sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini cenderung bergantung pada sektor perikanan tangkap. Pengembangan destinasi wisata seperti Balekambang, Sendang Biru, Goa Cina, dan Pantai Tiga Warna telah membuka peluang usaha baru di bidang jasa wisata, kuliner, perdagangan, transportasi lokal, dan ekonomi kreatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata berpotensi menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Insani *et al*. (2019) yang menunjukkan bahwa pengembangan sektor unggulan daerah melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memperkuat transformasi ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah sumber daya wilayah.

Dari dimensi sosial, implementasi pembangunan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang memperlihatkan semakin besarnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok konservasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan tersebut tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara mandiri. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata di seluruh kawasan pesisir. Pada beberapa lokasi, masyarakat masih lebih banyak berperan sebagai pelaksana kegiatan dibandingkan sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Selain itu, aspek aksesibilitas menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata pesisir dan pengurangan kemiskinan masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten Malang telah menjadikan pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata pesisir sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Perbaikan akses jalan menuju Pantai Ngliyep, Balekambang, Sendang Biru, dan beberapa destinasi lainnya bertujuan meningkatkan konektivitas kawasan pesisir dengan pusat-pusat ekonomi regional. Menurut Rimadevi *et al*. (2022), peningkatan aksesibilitas tidak hanya berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pasar, investasi, dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu mekanisme yang memperkuat hubungan antara pengembangan pariwisata pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Meskipun demikian, implementasi prinsip *sustainable development* di Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi, potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir antara kepentingan wisata dan perikanan, serta risiko degradasi lingkungan akibat meningkatnya aktivitas wisata. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan masih terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dapat menghambat pemerataan manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan tata kelola yang lebih terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang telah menunjukkan implementasi prinsip *sustainable development* melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan upaya konservasi lingkungan. Namun, efektivitasnya dalam mendukung tujuan pembangunan masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk menjawab tujuan penelitian, pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Malang.

Konsep *Inclusive Growth*

Dalam menganalisis dampak pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang, konsep *inclusive growth* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat lokal, khususnya kelompok pesisir yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan sosial. Perspektif ini penting karena tujuan penelitian tidak hanya berfokus pada peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga pada kemampuan sektor tersebut dalam mendukung pengurangan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan atau berkembangnya destinasi wisata, melainkan dari tingkat keterlibatan masyarakat dan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang telah membuka berbagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui usaha kuliner, perdagangan, jasa transportasi, penyewaan peralatan wisata, homestay, pemandu wisata, dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif lainnya. Di beberapa kawasan seperti Sendang Biru, Clungup Mangrove Conservation (CMC), Pantai Tiga Warna, dan Balekambang, masyarakat mulai terlibat dalam rantai ekonomi pariwisata yang sebelumnya didominasi oleh sektor perikanan dan pekerjaan informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata telah menciptakan alternatif sumber pendapatan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah sepenuhnya bersifat inklusif. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata masih menunjukkan variasi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Sebagian masyarakat telah memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, sementara kelompok lainnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, keterampilan, informasi pasar, dan peluang investasi wisata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat pesisir. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum secara otomatis menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan.

Analisis juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat inklusivitas pembangunan pariwisata pesisir. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan jaringan usaha cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kapasitas. Akibatnya, terdapat risiko munculnya kesenjangan manfaat antara kelompok yang mampu berpartisipasi aktif dalam sektor pariwisata dan kelompok yang masih bergantung pada mata pencaharian tradisional. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah agar manfaat pembangunan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks tujuan penelitian, temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Malang memiliki potensi untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan mekanisme distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM lokal, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan tingkat inklusivitas pembangunan pariwisata. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama yang memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, konsep *inclusive growth* menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi masih memerlukan penguatan aspek pemerataan manfaat dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan penelitian, pengembangan pariwisata pesisir tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi destinasi, tetapi juga pada penciptaan kesempatan yang setara bagi masyarakat pesisir untuk terlibat, memperoleh manfaat, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Hal ini menjadi prasyarat penting agar pariwisata benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan mampu mendukung pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Malang.

Adaptasi Terhadap Risiko Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang. Peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, gelombang tinggi, abrasi pantai, dan perubahan ekosistem laut tidak hanya mengancam aktivitas perikanan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas destinasi wisata yang bergantung pada kelestarian lingkungan pesisir. Destinasi seperti Sendang Biru, Clungup Mangrove Conservation (CMC), Pantai Tiga Warna, dan Balekambang sangat bergantung pada kondisi ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, konservasi mangrove, rehabilitasi pesisir, dan pengelolaan wisata berbasis daya dukung lingkungan menjadi strategi adaptasi yang penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus melindungi aset ekonomi masyarakat.

Bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian pendapatan akibat pergeseran musim ikan dan semakin tingginya risiko melaut. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata pesisir berperan sebagai bentuk diversifikasi ekonomi yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap sektor perikanan tangkap. Peluang usaha melalui jasa wisata, homestay, kuliner, penyewaan perahu, dan ekonomi kreatif memberikan sumber pendapatan alternatif ketika hasil tangkapan menurun. Temuan ini sejalan dengan Akbar dan Huda (2019) yang menegaskan bahwa diversifikasi mata pencaharian merupakan strategi penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir terhadap tekanan ekologis. Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai strategi adaptasi perubahan iklim. Semakin beragam sumber pendapatan masyarakat, semakin rendah ketergantungan mereka terhadap sektor yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, pariwisata pesisir berkontribusi pada pengurangan kerentanan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Malang.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kawasan wisata pesisir tidak bersifat seragam. Pada destinasi yang telah memiliki kelembagaan lokal yang kuat, seperti kawasan Sendang Biru dan Clungup Mangrove Conservation (CMC), masyarakat terlibat tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga dalam kegiatan konservasi, pengelolaan wisata, penyediaan jasa wisata, serta pengembangan usaha ekonomi lokal. Namun, pada beberapa kawasan lainnya, partisipasi masyarakat masih cenderung berada pada tingkat operasional dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mencapai bentuk partisipasi yang substantif.

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pokdarwis berperan cukup efektif sebagai penghubung antara pemerintah,

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

pengelola wisata, dan masyarakat lokal melalui kegiatan promosi destinasi, edukasi wisata, konservasi lingkungan, serta pengembangan usaha masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Setyanto dan Rusmini (2023) yang menegaskan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat. Namun demikian, efektivitas Pokdarwis masih dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kualitas kepemimpinan, akses terhadap sumber pendanaan, serta kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Pada beberapa lokasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan menyebabkan fungsi Pokdarwis belum optimal dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat secara luas.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pesisir. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan keterampilan usaha dan manajemen wisata, minimnya akses terhadap modal, serta belum meratanya informasi mengenai peluang ekonomi yang tersedia. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang sektor pariwisata sebagai kegiatan tambahan sehingga tingkat keterlibatan mereka belum maksimal. Kondisi ini mengakibatkan manfaat ekonomi dari sektor wisata cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki modal, keterampilan, atau akses yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya.

Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, partisipasi masyarakat memiliki hubungan langsung dengan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan pesisir. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pariwisata, semakin besar peluang mereka memperoleh tambahan pendapatan dari berbagai aktivitas ekonomi seperti usaha kuliner, homestay, jasa pemandu wisata, transportasi lokal, dan perdagangan produk lokal. Sebaliknya, rendahnya partisipasi akan membatasi distribusi manfaat ekonomi dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan peluang wisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pesisir berbasis masyarakat tidak hanya memerlukan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga strategi yang mampu memperluas keterlibatan masyarakat secara inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas pariwisata pesisir sebagai instrumen pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Malang sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi masyarakat dan kekuatan kelembagaan lokal. Penguatan kapasitas Pokdarwis, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perluasan akses terhadap modal dan informasi menjadi langkah penting agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat pesisir. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi prinsip pembangunan, tetapi juga menjadi mekanisme utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan pesisir.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah menempatkan sektor pariwisata pesisir sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi daerah melalui RPJMD Kabupaten Malang 2021–2026, pengembangan desa wisata, peningkatan aksesibilitas kawasan wisata, serta penguatan destinasi unggulan seperti Sendang Biru, Balekambang, *Clungup Mangrove Conservation* (CMC), Pantai Tiga Warna, dan kawasan pesisir lainnya. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat melalui sektor jasa wisata, kuliner, transportasi, perdagangan, dan usaha berbasis sumber daya pesisir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme yang mampu memastikan manfaat ekonomi terdistribusi secara merata kepada kelompok masyarakat miskin pesisir.

Dari aspek pengurangan kemiskinan, hubungan antara pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat melalui bertambahnya sumber pendapatan alternatif di luar sektor perikanan tangkap. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan homestay, usaha kuliner, jasa wisata, dan kelompok ekonomi kreatif memperoleh tambahan pendapatan yang berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, manfaat tersebut masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, keterampilan, dan jaringan usaha. Artinya, pariwisata telah menciptakan peluang ekonomi, tetapi efektivitasnya sebagai instrumen pengurangan kemiskinan masih dibatasi oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan juga menunjukkan beberapa kelemahan. Pertama, koordinasi antar organisasi perangkat daerah masih cenderung sektoral sehingga program pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal.

Kedua, kapasitas Pokdarwis dan kelembagaan lokal masih bervariasi antar destinasi sehingga kualitas pengelolaan wisata belum merata. Ketiga, program pelatihan dan pendampingan masyarakat masih bersifat insidental dan belum terhubung dengan kebutuhan riil pengembangan usaha wisata. Keempat, belum tersedia indikator yang secara khusus mengukur kontribusi pariwisata terhadap penurunan kemiskinan masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan pembangunan pariwisata lebih sering diukur berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan destinasi dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang disarankan adalah pengembangan model pariwisata pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program pengurangan kemiskinan daerah. Fokus kebijakan tidak hanya pada pembangunan destinasi wisata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar mampu masuk ke dalam rantai ekonomi pariwisata. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata dapat diukur melalui peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penurunan tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang perlu memimpin program penguatan kapasitas Pokdarwis melalui pelatihan manajemen destinasi, pemasaran digital, pelayanan wisata, dan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, bukan hanya pelatihan sesaat. Dinas Koperasi dan UMKM perlu memfasilitasi akses permodalan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM wisata pesisir agar mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing produk lokal. Dinas Kelautan dan Perikanan perlu mengembangkan program diversifikasi mata pencaharian nelayan melalui integrasi usaha perikanan dan wisata bahari sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut. Sementara itu, pemerintah desa dan BUMDes perlu berperan sebagai pengelola ekonomi lokal yang memastikan distribusi manfaat pariwisata dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, diperlukan pembentukan forum koordinasi pembangunan pariwisata pesisir yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Forum ini berfungsi untuk menyusun program terpadu, menyelesaikan konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan yang dijalankan. Melalui mekanisme tersebut, pembangunan pariwisata tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran orientasi pembangunan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang dari pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan destinasi menuju pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Penguatan kelembagaan lokal, pendampingan usaha yang berkelanjutan, akses pembiayaan bagi masyarakat pesisir, serta integrasi program lintas sektor menjadi langkah operasional yang harus dilakukan pemerintah daerah agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Malang.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pembangunan pesisir berbasis kearifan lokal dengan model partisipatif seperti *Community-Based Ecotourism (CBET)* dan *Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM)* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Kombinasi kebijakan adaptif dan partisipasi komunitas terbukti menciptakan sinergi yang mendorong keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kemiskinan struktural di wilayah pesisir. Model CBET dan CBCRM tidak hanya efektif di Malang, tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk direplikasi di wilayah pesisir lain asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Kedua pendekatan ini bekerja karena menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama, sehingga nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dapat tumbuh secara simultan. Dengan memanfaatkan budaya lokal, praktik tradisional, dan struktur sosial masyarakat di tiap daerah, model ini dapat diperkuat dan dimodifikasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa ketika pendekatan partisipatif dan kearifan lokal berjalan seiring, efektivitas konservasi meningkat dan dampak pengurangan kemiskinan menjadi lebih nyata.

Pariwisata pesisir di Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa dan instrumen strategis pengurangan kemiskinan berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan keindahan alam, kekayaan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

budaya maritim, serta karakteristik lokal desa pesisir seperti Balekambang, Sendang Biru, dan Tiga Warna, pariwisata mampu menciptakan diversifikasi ekonomi yang mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan yang rawan dan tidak stabil. Pendekatan pembangunan berbasis komunitas (*community-based tourism*) mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola destinasi wisata, sehingga hasil ekonominya tidak dimonopoli pelaku eksternal, melainkan dirasakan langsung oleh warga desa. Inovasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini, termasuk penguatan kapasitas SDM lokal, penyediaan infrastruktur dasar, promosi digital, dan regulasi yang mendukung konservasi lingkungan. Dalam perspektif teori pembangunan partisipatif dan pendekatan endogen, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek intervensi, tetapi sebagai pusat kreativitas dan pengambil keputusan. Keberhasilan model ini menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk menjamin keadilan distribusi manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan ekologis kawasan pesisir. Oleh karena itu, pariwisata pesisir tidak hanya penting sebagai sektor pertumbuhan ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai jalan menuju transformasi sosial dan penguatan ketahanan desa dalam menghadapi tantangan kemiskinan struktural.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesainya penulisan artikel ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Modern Al Rifa`ie Indonesia Malang yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam proses penulisan artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor utama dalam penulisan ini adalah Rukin sekaligus penulis utama dan corresponding author.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, T., & Huda, M. (2019). Nelayan, lingkungan, dan perubahan iklim (Studi terhadap kondisi sosial ekonomi pesisir di Kabupaten Malang). *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi, 68*(1), 45–52. https://doi.org/10.36456/wahana.v68i1.630.

Andini, D., *et al*. (2024). Arahan pengembangan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata alam di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP), 9*(4), 383–396.

Ariyanti, Y. (2015). *Analisis kemiskinan nelayan perikanan tangkap di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur* [Skripsi, Universitas Brawijaya].

Fauzi, A. (2014). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6*(2), 101–112. https://doi.org/10.29244/jmpd.6.2.101-112.

Handartoputra, A., Purwanti, F., & Hendrarto, B. (2015). Penilaian kerentanan pantai di Sendang Biru terhadap variabel oseanografi berdasarkan metode CVI. *Jurnal Maquares, 4*(1).

Handayani, F., *et al*. (2023). Peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Jenggolo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 8*(1), 51–60. https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.7692.

Harahab, N., Fanani, Z., Puspitawati, D., & Said, A. (2020). Ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di kawasan ekowisata bahari Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional, 26*(2), 157–174. https://doi.org/10.22146/jkn.53372.

Hidayat, C., Weganova, R., & Liskinasih, A. (2023). Peningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan ekowisata berbasis kearifan. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 8*(1), 50–57. https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.7692.

Hidayat, R. (2013). Analisis kelayakan ekonomi pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18*(1), 55–66. https://doi.org/10.22146/jeb.2013.18.1.55-66.

Husamah, H. (2017). Community-based ecotourism principles in management of Clungup Mangrove Conservation. *Academia.edu*.

Insani, N., A'rachman, F. R., Sanjiwani, P. K., & Imamuddin, F. (2019). Studi kesesuaian dan strategi pengelolaan ekowisata Pantai Ungapan, Kabupaten Malang untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 4*(1), 1–10.

Kewuel, I. M., Prasetya, A. W. U., *et al*. (2024). Pemetaan partisipatif dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Gunungsari, Kota Batu. *Journal of Tourism Destination and Attraction, 5*(1), 45–60.

Kusuma, H. (2015). Evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19*(3), 233–245. https://doi.org/10.22146/jsp.2015.19.3.233-245

Lestari, D. (2012). Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap lingkungan sosial masyarakat pesisir. *Jurnal Sosiologi, 10*(2), 145–156. https://doi.org/10.20473/js.v10i2.2012.145-156.

Mulyani, S. (2011). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pesisir berbasis kearifan

lokal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat, 9*(1), 33–44.

Nugroho, R. (2016). Model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di wilayah pesisir. *Jurnal Pariwisata, 3*(1), 15–25. https://doi.org/10.31294/jpar.v3i1.2016.

Pemerintah Kabupaten Malang. (2021). *RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021–2026*.

Prasetiyo, A. (2021). Pengembangan objek wisata Pantai Modangan dalam perspektif collaborative governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 20*(1), 10–19.

Putri, L. A. (2017). Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata pesisir. *Jurnal Administrasi Publik, 14*(2), 200–210. https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.2017.200-210.

Rahma, P. D., & Primasworo, R. A. (2018). Strategi pengembangan desa wisata pesisir di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Reka Buana: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia, 3*(1), 1–10. https://doi.org/10.33366/rekabuana.v3i1.917.

Rimadevi, G., Mindarti, L. I., & Hanafi, I. (2022). Evaluasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis pembangunan berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8*(2), 123–132. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.7.

Rukin. (2020). Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 1 – 14. https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.1998.

Sari, M. (2018). Analisis dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 26*(1), 89–100. https://doi.org/10.24843/JEP.2018.v26.i01.p08.

Setyanto, T. J., & Rusmini, A. (2014). Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata. *Jurnal Administrasi Publik, 10*(2).

Setyanto, T. J., & Rusmini, A. (2023). Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pengembangan industri pariwisata. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1*(2), 75–88. https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.45

Tiyasmono, K. D., Riyanti, G. A., & Hardianto, F. N. (2019). Model konseptual hubungan modal sosial dan pengembangan desa wisata. *Management Dynamic Conference, 5*, 214–220.

Waluyo, A. (2014). Permodelan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang berbasis masyarakat (Studi kasus Pulau Raas Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan, 7*(2), 75–85.

Yulianti, S. (2020). Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 16*(2), 123–134. https://doi.org/10.14710/pwk.v16i2.123-134.

Zahra, N. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Tambakrejo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(1), 45–55. https://doi.org/10.22146/jpkm.2019.5.1.45.